

PENGUATAN KETERAMPILAN BAHASA INGGRIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) CIREBON

Royani Afriani
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Maimunah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

royani.afriani@syekh Nurjati.ac.id

maimunah@gmail.com

• **Received:** 20 April 2020. • **Accepted:** 23 Mei 2020 • **Published online:** 30 Juni 2020.

Abstract

Penelitian ini dilakukan dalam rangka turut menyelesaikan satu dari beberapa persoalan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia. Penelitian yang mengambil topic tentang Penguatan Keterampilan Bahasa Inggris bagi Calon Pekerja Migran Indonesia ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Quranniyah, Kranggan, Indramayu. Penelitian dilakukan selama empat bulan dalam bentuk pendidikan dan pengajaran. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris CPMI di Indramayu. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Dinas Ketenagakerjaan Indramayu dan Pengasuh, guru, ustadz, dan santri di Pondok Pesantren Al-Quranniyah.

Kata kunci: Keterampilan Bahasa Inggris, Pekerja Migran, Indramayu

Abstract

This research is carried out in order to find an alternative solution to solve problems faced by Indonesian Migrant Workers. The title of the research is Improving the Capability of Potential Indonesian Migrant Worker in English. The program was carried out at Al-Quranniyah Islamic Boarding School, Kranggan, Indramayu. The program was completed for four months. The output of this activity is the increasing skill in English of potential Migrant worker in Indramayu. The parties involved in this activity are the Department of Manpower, Indramayu, Kyai or respected religious leader, teachers, and students at the Al-Quranniyah Islamic Boarding School.

Keywords: English skill, Migrant Worker, Indramayu

A. PENDAHULUAN

Jaminan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang mengadu nasib di negeri orang di nilai belum optimal. Padahal, UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah mengatur jaminan perlindungan TKI sejak keberangkatan hingga kepulangan ketanah air. Pemberian pelatihan dan penguatan ketrampilan berbahasa Inggris membantu dan memudahkan PMI berkomunikasi dengan orang asing di tempat mereka bekerja. Berdasarkan penelitian dan pengabdian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat kebutuhan pelatihan penguatan kemampuan

bahasa PMI secara berkelanjutan karena; Pertama, kemampuan bahasa tidak bisa dilakukan hanya satu kali dengan waktu 4 (empat) bulan. Kedua, pada program sebelumnya, target peserta hanya 30 peserta. Padahal, seperti yang kita tahu, jumlah PMI kita saat ini berdasarkan data yang ada di Indonesia berdasarkan hasil analisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat 6,5 juta pekerja migran Indonesia. Artinya, kebutuhan akan pelatihan peningkatan bahasa masih tinggi untuk dapat menyiapkan kemampuan bahasa PMI sebelum mereka diberangkatkan.

Pada tanggal 25 Oktober 2017 DPR telah mensahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 tahun 2017. Berdasarkan UU tersebut, definisi dari pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

UU tersebut lahir sebagai upaya pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Republik Indonesia. Perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.

Selanjutnya tujuan dari perlindungan calon PMI adalah, (1) Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI; dan (2) Menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial PMI dan keluarganya. Penguatan peran negara baik di tingkat pusat dan daerah menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada PMI dan penghormatan hak asasi manusia.

Tabel:

Tugas dan Tanggung Jawab			
Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Desa
Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak PMI	Memberikan perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja.	Memberikan perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja	Melakukan pemberdayaan kepada calon PMI, PMI dan keluarganya
Mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI	Menerbitkan ijin kantor cabang perusahaan PMI dan melaporkan hasil evaluasinya secara berjenjang	Melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan PMI kepada Pemprov.	Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon PMI
Membentuk dan	Mengatur,	Menyosialisasikan	Menerima dan

mengembangkan sistem informasi terpadu	membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI	informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat, membuat basis data PMI.	memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi
Melakukan koordinasi kerja sama antar instansi dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus PMI	Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI.	Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI	Melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI
Mengurus kepulangan PMI	Menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI	Mengurus kepulangan PMI	Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI
Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di kabupaten/kota	

Berdasarkan table di atas dapat kita lihat bahwa pemenuhan hak pendidikan dan pelatihan kerja merupakan tugas pemerintah baik di tingkatan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Amanat undang-undang tersebut harus dilaksanakan agar dapat melindungi dan meminimalisir tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migrant kita di luar negeri.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan bahasa Inggris 30 orang calon Buruh Migran Indonesia di wilayah Indramayu.

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri dengan tujuan negara-negara berbahasa Inggris masih minim penguatan bahasa sebelum mereka diberangkatkan. Berdasarkan data yang ada, beberapa negara tujuan yang banyak dipilih oleh para calon Pekerja Migran Indonesia adalah Negara – Negara berbahasa Inggris, seperti Singapore, Hong Kong, serta Negara lainnya.

Meskipun beberapa Negara lain yang menjadi daerah tujuan utama bukan Negara berbahasa Inggris, sebagai bahasa Internasional yang paling banyak digunakan di dunia,

para pekerja migrant tetap membutuhkannya. Oleh sebab itu, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris calon PMI. Berikut ini adalah materi penguatan bahasa untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini terangkum dalam Rumusan Masalah dari kegiatan ini yaitu Bagaimanakah tingkat penguasaan bahasa asing bagi PMI?

Tujuan Penelitian ini adalah (1) mendapatkan gambaran tentang pengetahuan dan kemampuan bahasa Asing calon Pekerja Migran Indonesia dan (2) Menyiapkan PMI yang lebih berkualitas melalui penguatan bahas asing sehingga melahirkan rasa percaya diri dan kekuatan diri para pekerja imigran Indonesia dalam bekerja di luar negeri. Maka, dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris diharapkan para PMI lebih memiliki rasa kepercayaan diri. Sehingga, hasil secara tidak langsung yang diharapkan adalah meminimalisir berbagai persoalan PMI seperti kekerasan, penipuan dan tindakan lain yang merugikan PMI

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; membangun komunikasi dengan dinas dan pihak terkait. Dalam hal ini dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indramayu. Membangun komunikasi dengan Tokoh masyarakat setempat. Dalam hal ini adalah pimpinan Pondok Pesantren al-Quranniyah. Selanjutnya dilakukan Need Assessment: Need Assesment adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan program. hasil dari kegiatan ini adalah terdatanya kebutuhan terkait penguatan bahasa asing calon peserta pelatihan. Pelatihan Penguatan Bahasa Inggris Calon BMI di Pondok Pesantren Al-Qur'anniyah. Evaluasi dan Monitoring. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat kendala dan masalah yang pada saat pelaksanaan penelitian. Juga melibatkan beberapa pihak sebagai berikut:

A. Disnakertrans Indramayu

Bentuk keterlibatan dari pihak Dinas adalah dalam hal kelengkapan data terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Indramayu. Tugas Pokok Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja diantaranya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri serta perluasan kesempatan kerja. Selain itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja juga meliputi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri serta perluasan kesempatan kerja;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri serta perluasan kesempatan kerja;
- 3) pembinaan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri serta perluasan kesempatan kerja;
- 4) pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- 5) pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- 6) pelaksanaan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- 7) pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- 8) pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- 9) pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- 10) dll

Oleh karena itu, pelibatan Kepala Penempatan Tenaga Kerja menjadi sangat penting dalam hal ini berkaitan dengan informasi terbaru tentang jumlah CPMI dan Negara yang menjadi tujuan CPMI. Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; (2) Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri; dan (3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

B. Pengasuh PP. AL-QUR'ANNIYAH Indramayu

Penelitian penguatan Bahasa Inggris bagi calon PMI dilaksanakan di Pondok pesantren yang terletak di Desa dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Pondok pesantren ini didirikan tahun 1965. Keterbukaan pihak Pesantren, khususnya Pengasuh Pondok Pesantren, KH. Zuhri memungkinkan adanya kerjasama untuk pelaksanaan penelitian penguatan bahasa dalam hal pengorganisasian peserta, tempat, dan lainnya.

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Indramayu merupakan salah satu wilayah Kerisedenan Cirebon. Indramayu merupakan salah satu daerah pengirim PMI tertinggi di Indonesia. Penguatan pelatihan bahasa Inggris kepada masyarakat dilakukan di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyyah. Pemilihan Pondok Pesantren sebagai tempat pelaksanaan penelitian karena lokasi pesantren yang berada di tengah-tengah masyarakat, terletak di Krangken Indramayu. Daerah ini merupakan salah satu wilayah dengan jumlah PMI tertinggi di wilayah Indramayu seperti yang terlibat berdasarkan table di bawah ini

**REKAPITULASI PENDAFTARAN CPMI
TAHUN 2017
PER KECAMATAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NO	KECAMATAN	L	P	JUMLAH
1	ANJATAN	47	755	802
2	ARAHAN	24	265	289
3	BALONGAN	101	586	687
4	BANGODUA	30	320	350
5	BONGAS	27	442	469
6	CANTIGI	37	294	331
7	CIKEDUNG	20	320	340
8	GABUSWETAN	33	370	403
9	GANTAR	7	190	197
10	HAURGEULIS	17	368	385
11	INDRAMAYU	512	836	1,348
12	JATIBARANG	61	716	777
13	JUNTINYUAT	182	1,371	1,553
14	KANDANGHAUR	42	606	648
15	KARANGAMPEL	66	695	761

16	KEDOKANBUNDER	43	512	555
17	KERTASEMAYA	42	715	757
18	KRANGKENG	55	824	879
19	KROYA	24	420	444
20	LELEA	56	450	506
21	LOHBENER	46	568	614
22	LOSARANG	22	402	424
23	PASEKAN	22	155	177
24	PATROL	18	479	497
25	SINDANG	32	357	389
26	SLIYEG	81	836	917
27	SUKAGUMIWANG	29	471	500
28	SUKRA	18	457	475
29	TERISI	23	429	452
30	TUKDANA	47	699	746
31	WIDASARI	25	393	418
	JUMLAH	1,789	16,301	18,090

**REKAPITULASI PENDAFTARAN CPMI
TAHUN 2018
PER KECAMATAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NO	KECAMATAN	L	P	JML
1	ANJATAN	155	850	1,005
2	ARAHAN	63	402	465
3	BALONGAN	224	573	797
4	BANGODUA	83	394	477
5	BONGAS	77	515	592
6	CANTIGI	111	357	468

7	CIKEDUNG	45	377	422
8	GABUSWETAN	83	473	556
9	GANTAR	30	219	249
10	HAURGEULIS	62	428	490
11	INDRAMAYU	125	673	798
12	JATIBARANG	113	789	902
13	JUNTINYUAT	333	1449	1,782
14	KANDANGHAUR	111	640	751
15	KARANGAMPEL	122	736	858
16	KEDOKANBUNDER	97	663	760
17	KERTASEMAYA	216	760	976
18	KRANGKENG	125	929	1,054
19	KROYA	76	679	755
20	LELEA	96	564	660
21	LOHBENER	92	684	776
22	LOSARANG	50	524	574
23	PASEKAN	45	189	234
24	PATROL	87	711	798
25	SINDANG	70	442	512
26	SLIYEG	211	1019	1,230
27	SUKAGUMIWANG	77	494	571
28	SUKRA	43	629	672
29	TERISI	56	552	608
30	TUKDANA	183	886	1,069
31	WIDASARI	57	480	537
	JUMLAH	3318	19080	22,398

Berdasarkan table di atas dapat di ketahui bahwa Krangkeng merupakan salah satu daerah dengan jumlah PMI tertinggi di wilayah Indramayu. Sebanyak 55 PMI laki-laki dan 824 PMI perempuan di tahun 2017 menjadi pekerja migran. Selanjutnya, terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 125 PMI laki-laki dan 925 PMI perempuan.

Masih berdasarkan data di atas, belum terjadi perubahan tren tentang tingginya jumlah perempuan yang menjadi pekerja migrant. Pada tahun 2017, jumlah laki-laki yang menjadi PMI sebanyak 1.787 dan perempuan sebanyak 16.301. Di tahun

selanjutnya, pada tahun 2018, jumlah laki-laki naik menjadi 3.318 dan peningkatan juga terjadi pada perempuan yang menjadi PMI yaitu sebesar 19.080.

Jika tren tentang jumlah laki-laki dan perempuan yang menjadi PMI belum mengalami perubahan, hal yang sebaliknya terjadi pada tren tentang negara tujuan PMI. Sejak diterapkannya moratorium untuk sektor non-formal di beberapa negara di Timur Tengah, jumlah PMI yang menjadikan negara Timur Tengah sebagai negara tujuan juga menjadi turun. Hal tersebut dapat terlihat pada table di bawah ini.

**REKAPITULASI PENDAFTARAN CTKI
PER NEGARA
KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2017**

NO	NEGARA	L	P	JUMLAH
1	BRUNAI DARUSSALAM	55	100	155
2	HONG KONG	1	3,904	3,905
3	MALAYSIA	491	2,049	2,540
4	SINGAPURA	3	2,354	2,357
5	TAIWAN	769	7,686	8,455
6	KOREA SELATAN	467	157	624
7	JEPANG	3	51	54
	JUMLAH	1,789	16,301	18,090

**TAHUN 2018
PER NEGARA
KABUPATEN INDRAMAYU**

NO	NEGARA	L	P	JML
1	BRUNAI DARUSSALAM	98	197	295
2	HONG KONG	41	4283	4,324
3	MALAYSIA	688	2202	2,890
4	SINGAPURA	13	2880	2,893
5	TAIWAN	1949	9370	11,319
6	KOREA SELATAN	510	64	574
7	SAUDI ARABIA	4	10	14
8	UNITED ARAB EMIRATES	3	5	8
9	BAHRAIN	3	66	69
10	OMAN	0	1	1
11	KUWAIT	9	2	11

JUMLAH	3,318	19,080	22,398
---------------	--------------	---------------	---------------

Berbagai kasus kekerasan hingga eksekusi mati PRT migran Indonesia di Arab Saudi membuat Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan moratorium penghentian pengiriman TKI khususnya PRT migran ke 21 negara di Timur Tengah yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2015 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015. Tidak hanya sekali, sebelumnya Pemerintah juga telah mengeluarkan moratorium yang sama untuk Malaysia (2009) dan Saudi Arabia (2011) atas pertimbangan yang sama yaitu dikarenakan banyaknya jumlah kasus kekerasan yang dialami TKI di negara penempatan, Sehingga moratorium dikeluarkan untuk tujuan melakukan perlindungan TKI di negara-negara yang kerap bermasalah, merendahkan kemanusiaan dan martabat Indonesia di dunia Internasional.

Dampak moratorium tersebut adalah terjadi pergeseran tren negara yang menjadi tujuan PMI khususnya yang berada di Indramayu. Berdasarkan table di atas, dapat di lihat bahwa beberapa negara yang menjadi tujuan PMI di Indramayu adalah negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya. Hongkong, Malaysia dan Singapura adalah negara-negara yang berbahasa Inggris.

Pada tahun 2017 terdapat 3,905 PMI yang menjadikan Hongkong sebagai negara tujuan. Sementara di tahun 2018 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 4,324 PMI yang menjadikan Hongkong sebagai negara tujuan. Sementara itu, Malaysia dan Singapura juga menjadi negara berbahasa Inggris lain yang menjadi tujuan PMI di wilayah Indramayu 2,540 Malaysia tahun 2017 dan Singapura 2,357 tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 jumlah PMI yang menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan sebanyak 2,890 dan Singapura 2,893 PMI. Artinya, pada tahun 2017

Sementara itu, program-program pelatihan yang ada di Indramayu tidak banyak yang dilakukan oleh pemerintah bagi CPMI yang akan bekerja ke negara-negara berbahasa Inggris. BLK (Balai Latihan Kerja) Dinas Tenaga Kerja Indramayu merupakan salah satu lembaga yang ada di Dinas Tenaga Kerja Indramayu. BLK berada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 01 Indramayu 45216 dan Telepon: (0234) 274382 Email: support@blkindramayu.com. UPTD ini memberikan layanan pelatihan kerja secara gratis untuk masyarakat umum. Hal ini dapat terlihat pada brosur di bawah ini.



Berdasarkan brosur di atas dapat kita lihat bahwa sampai dengan saat ini, program dalam Balai Latihan Kerja atau BLK antara lain adalah:

1. Juru Las
2. Mekanik Junior Sepeda Motor
3. Operator basic Office
4. Junior Graphic Designer
5. Junior Technical Support
6. Garmen (Menjahit Pakaian Dasar)
7. Eknik Pendingaman AC Split
8. Caretaker

Selain BLK yang dibawah Dinas Tenaga Kerja, terdapat juga LPK atau Lembaga Pendidikan Keterampilan yang cukup banyak di wilayah Indramayu. LPK merupakan lembaga yang berdiri untuk merespon adanya program pemerintah *G to Gatau* Government to Government untuk memenuhi persyaratan Bahasa asing. Berikut adalah contoh-contoh brosur pelatihan bahasa yang dilakukan oleh LPK.



Di awal program pada 2004-2006, penempatan TKI ke Korea Selatan dilakukan oleh Kemenakertrans sebelum Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia atau BNP2TKI dibentuk. Namun, sejak tahun 2007 sampai saat ini penempatan TKI ke Korea melalui program G to G dilakukan oleh BNP2TKI.

Program G to G yang ada saat ini adalah untuk Negara Jepang dan Korea. Artinya, persiapan bahasa lebih banyak pada dua bahasa tersebut karena program G to G mensyaratkan kemampuan bahasa. Sementara, untuk Negara lain, termasuk Negara berbahasa Inggris belum ada. Padahal, Calon Pekerja Migran Indonesia atau CPMI yang menjadikan Negara yang berbahasa Inggris sebagai Negara tujuan cukup banyak yaitu 8.801 antara tahun 2017 dan 10.107 pada tahun 2018 berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Indramayu. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah PMI yang bekerja di Korea ataupun Jepang.

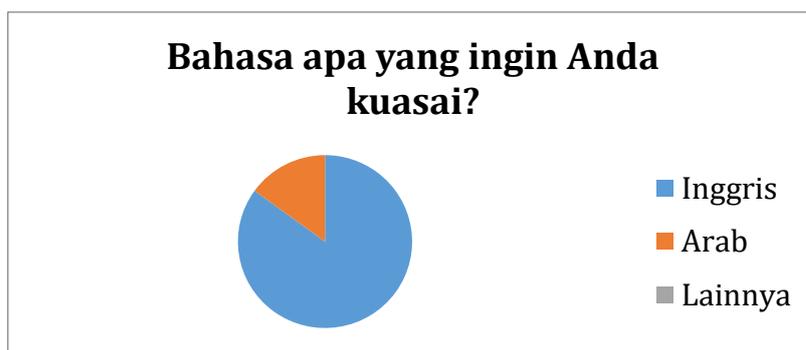
Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Penempatan Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja Indramayu dikatakan bahwa persiapan bahasa diberikan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI dahulu bernama PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Sukirman, Wawancara. 18 Oktober 2019). Artinya, pemerintah belum memastikan secara langsung persiapan bahasa CPMI atau Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum mereka diberangkatkan. Pemerintah menyerahkan persoalan tersebut kepada P3MI sebagai perusahaan swasta yang akan memberangkatkan PMI. Padahal sampai dengan saat ini, kritik terhadap kinerja P3MI masih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang konsen terhadap isu pekerja migrant.

Oleh karena itu, penguatan Bahasa Inggris dilakukan di daerah yang banyak PMI karena asumsinya antusiasme masyarakat untuk bekerja di luar negeri kedepan masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah PMI antara tahun 2017-2018. Pelatihan Bahasa Inggris yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Qur'anniyah dilaksanakan pada santri dengan target jumlah peserta sebanyak 30 peserta.



Survey yang dilakukan pada saat tentang apa yang ingin mereka lakukan setelah lulus sekolah menunjukkan hasil sebanyak 85% menyatakan mereka akan bekerja setelah mereka lulus dari sekolah. Selanjutnya, 15% dari mereka menyatakan bahwa mereka ingin melanjutkan sekolah dan 0% yang menjawab ingin menikah setelah lulus sekolah.

Kemampuan berbahasa Inggris rata-rata peserta masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai saat mereka mengikuti tes kemampuan dasar berbahasa Inggris. Meski demikian, sebanyak 85% peserta menjawab Bahasa Inggris dan hanya 15% yang menjawab bahasa Arab.



Berdasarkan tes kemampuan dasar peserta. 70% peserta dapat menjawab dengan baik pertanyaan dasar seperti:

How old are you?
(a). No, I am not (b). I'm 20 (c). I 20
Where are they from?
(a). There are from Indonesia (b) They're from Indonesia (c). I'm from Indonesia
Do you have a brother or sister?
(a). No. I not have (b). No, They don't (c). No, I don't

Hasil penguatan bahasa Inggris selain dampak langsung terdapat juga dampak tidak langsung. Dampak langsung dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya 29 siswa di wilayah Indramayu yang memiliki skill bahasa Inggris yang lebih baik dari sebelumnya khususnya terkait topik-topik dasar seperti tentang cara pengenalan diri, berdialog di airport, rumah sakit, dll.

Dampak tidak langsung dari kegiatan ini adalah:

1. Menumbuhkan kesadaran diri siswi-siswi ponpes untuk memiliki ketrampilan sebagai bekal diri.
2. Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan pihak Pondok Pesantren tentang persiapan ketrampilan dan kemampuan bahasa bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat penting bahasa Inggris pada saat ini bagi setiap orang tidak hanya bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri.
4. Menumbuhkan semangat belajar bahasa Inggris bagi masyarakat umum dan Pondok Pesantren

D. KESIMPULAN

Pelibatan secara langsung dengan dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja pada kegiatan pengabdian di masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan karena beberapa hal seperti:

1. Tersedianya data terbaru tentang kondisi PMI dan CPMI di wilayah Indramayu.
2. Tersedianya informasi tentang informasi pelatihan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
3. Kerjasama antara lembaga pendidikan dan dinas terkait perlu terus diupayakan dibangun agar proses pendampingan menjadi lebih mudah dilakukan dan menysasar secara langsung pada target sasaran

REFERENCES

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_366944.pdf

<https://www.republika.co.id/berita/q1p84r428/bahasa-masih-jadi-kendala-pekerja-migran>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/10/23/ndvkxy-pondok-pesantren-alquraniyah-krangkeng-bentengi-moral-masyarakat-2habis>

Ibad, M,I., Muthahhari, N., Ikhtiyarini, P., Fathulloh., Maarif, A.B.,and Nuraini. F., 2013. Buruh migran menggugat: laporan pemantauan keterbukaan informasi publik di sektor migrasi ketenagakerjaan. Yogyakarta: Pusat Sumber Daya Buruh Migran-Infest Yogyakarta.

Laporan Tahun 2016, Internasiola Labour Organization (ILO). www.ilo.org

Laporan Tahun 2017, Internasiola Labour Organization (ILO). www.ilo.org

Rahayu, M,D, and Isbandono,P,I. 2010. Pengawasan terhadap PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta) oleh dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur: studi pada pra penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Jakarta: Universitas Negeri Surabaya.

Undang-undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia